

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

HALAMAN VERIFIKASI

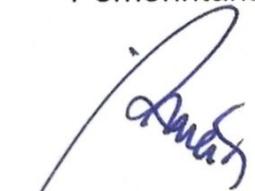
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


Rinawati Heri Prastuti, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


Aziz Sugiharto, S.AP
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEM ANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020 ..	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020	11
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	98
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	103
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	112
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	112
2.7 Penghargaan	115
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	116
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	116
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	121
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	124
4.1 Program dan Kegiatan	124
BAB V. PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2021 & Capaian Renstra s.d Tahun 2021
- Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.3 : Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.4 : Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
- Tabel 2.5 : PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2021
- Tabel 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021
- Tabel 2.7 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016-2021
- Tabel 2.9 : Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
- Tabel 2.10 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.11 : Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2016-2021
- Tabel 2.12 : Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian
- Tabel 2.13 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.14 : Nilai Pemingkatan Badan Publik Tahun 2021
- Tabel 2.15 : Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.16 : Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.17 : Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.18 : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.19 : Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran
- Tabel 2.20 : LPP di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.21 : Area Publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2021
- Tabel 2.22 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.23 : Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.24 : Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

- Tabel 2.25 : Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
- Tabel 2.26 : Sistem Informasi yang Terintegrasi
- Tabel 2.27 : Detail Sistem Informasi Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.28 : Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
- Tabel 2.29 : Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2021
- Tabel 2.30 : Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.31 : Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.32 : Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021
- Tabel 2.33 : Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.34 : Hasil *TT Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.35 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023
- Tabel 2.36 : Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Tabel 2.37 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah
- Tabel 2.38 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
- Tabel 3.1 : Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo
- Tabel 4.1 : Perbandingan Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023
- Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021
- Gambar 2.3 : Website PPID Kabupaten Temanggung
- Gambar 2.4 : Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan
- Gambar 2.5 : Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa
- Gambar 2.6 : Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah
- Gambar 2.7 : Media Komunikasi KIM Tingkat Desa
- Gambar 2.8 : Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

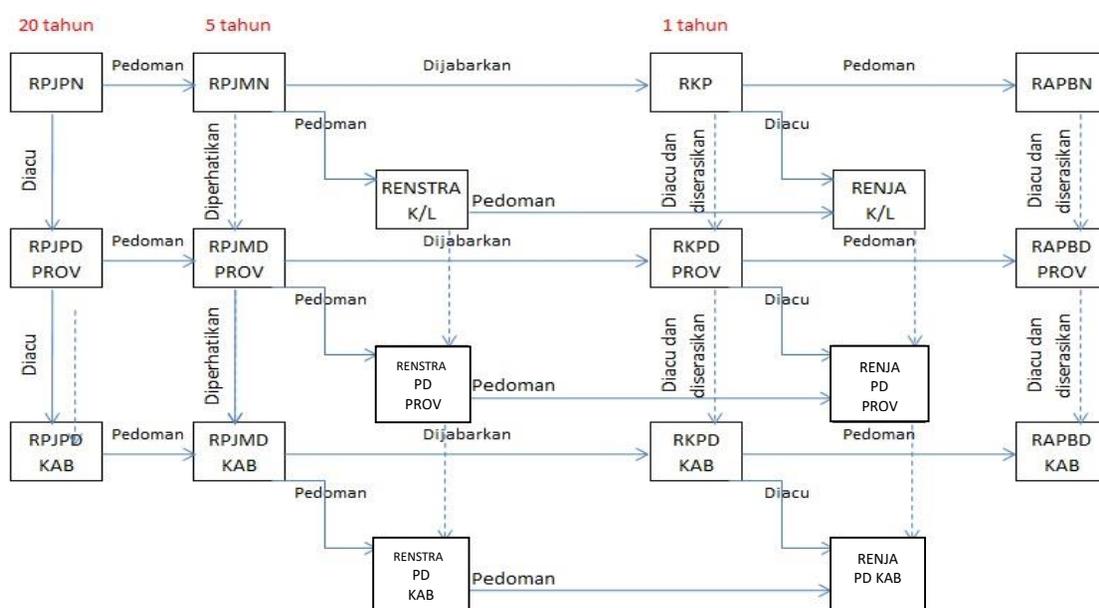
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinkominfo Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai Renstra Dinkominfo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Perencanaan Dinkominfo;
- 12) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, dan perkiraan realisasi Tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun lalu berdasarkan Perubahan Renstra Dinkominfo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinkominfo dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinkominfo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Dinkominfo.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinkominfo. Namun dalam proses ini Dinkominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinkominfo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, serta inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah;

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2021
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN,
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2021 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Tahun 20201

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	BELANJA DAERAH				48.654.452.899				12.617.915.122	10.283.011.381		9.897.750.014		96,25	-	9.897.750.014			
2.16.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				17.117.128.219				3.532.415.122	3.692.271.131		3.517.884.605		95,28					
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100				100			100		100						
2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.689.802.459				3.248.415.122	3.102.415.781		3.058.518.054		98,59					
2.16.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	70	15.689.802.459			12	3.248.415.122	3.102.415.781	12	3.058.518.054	100	98,59	12	3.058.518.054			
2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				664.400.000				-	332.200.000		206.764.800		62,24					
2.16.0 1.2.02 .01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat	paket	4	664.400.000			1	-	332.200.000	1	206.764.800	100	62,24	1	206.764.800			
2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.323.060				145.000.000	78.701.650		78.450.769		99,68					
2.16.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	45.659.800			12	10.000.000	9.391.350	12	9.256.550	100	98,56	12	9.256.550			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	n Bangunan Kantor																		
2.16.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	68.883.660			12	15.000.000	11.532.300	12	11.526.300	100	99,95	12	11.526.300			
2.16.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	49.495.600			12	10.000.000	6.982.000	12	6.962.750	100	99,72	12	6.962.750			
2.16.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	130.818.000			12	35.000.000	16.023.000	12	15.996.050	100	99,83	12	15.996.050			
2.16.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas	Bulan	60	270.466.000			12	75.000.000	34.773.000	12	34.709.119	100	99,82	12	34.709.119			
2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				474.732.200				114.000.000	100.574.000		97.923.303		97,36					
2.16.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Bulan	60	10.060.000			12	-	1.485.000	12	1.381.500	100	93,03	12	1.381.500			
2.16.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	60	48.642.000			12	20.000.000	6.000.000	12	5.369.479	100	89,49	12	5.369.479			
2.16.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	70.285.800			12	15.000.000	14.090.500	12	14.031.600	100	99,58	12	14.031.600			
2.16.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium SS Sekretariat, tenaga kebersihan, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Bulan	60	345.744.400			12	79.000.000	78.998.500	12	77.140.724	100	97,65	12	77.140.724			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				387.270.500				25.000.000	78.379.700		76.227.679	100	97,25							
2.16.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian sukucadang kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	288.193.700			12	15.000.000	63.995.700	12	63.810.279	100	99,71	12	63.810.279					
2.16.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	60	99.076.800			12	10.000.000	14.384.000	12	12.417.400	100	86,33	12	12.417.400					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.01													100								
												Predikat	Sangat Tinggi								
2.16.0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				12.933.422.770				5.499.500.000	3.457.674.550		3.323.857.324		96,13							
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20		100		15,0 0			14,66		97,73								
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30		100		20,0 0			21,88		100								
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100		100		100			100		100								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12.933.422.770				5.499.500.000	3.457.674.550		3.323.857.324		96,13					
2.16.0 2.2.01 .02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Bulan	60	268.603.360			12	110.000.000	93.603.700	12	90.519.008	100	96,70	12	90.519.008			
2.16.0 2.2.01 .04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan Perangkat Multimedia Produksi dan Pengelolaan Konten Informasi, Operasional Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah (Media Luar Ruang)	Bulan	60	1.226.234.260			12	252.500.000	234.638.600	12	232.319.386	100	99,01	12	232.319.386			
2.16.0 2.2.01 .05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Bulan	60	9.099.136.650			12	4.466.000.000	2.696.456.550	12	2.589.690.129	100	96,04	12	2.589.690.129			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2.16.0 2.2.01 .06	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Bulan	60	640.308.400			12	152.000.000	129.978.000	12	115.278.205	100	88,69	12	115.278.205					
2.16.0 2.2.01 .07	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Keg.	9	454.831.800			3	100.000.000	49.831.800	3	49.830.000	100	100	3	49.830.000					
2.16.0 2.2.01 .08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Keg.	11	304.499.800			3	142.000.000	79.179.800	3	78.711.500	100	99,41	3	78.711.500					
2.16.0 2.2.01 .10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Bulan	60	587.552.000			12	132.000.000	109.050.400	12	102.792.596	100	94,26	12	102.792.596					
2.16.0 2.2.01 .12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Keg.	17	352.256.500			3	145.000.000	64.935.700	3	64.716.500	100	99,66	3	64.716.500					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.02													100								
												Predikat	Sangat tinggi								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.16.0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				16.450.136.960				3.021.000.000	2.848.636.500		2.801.640.810		98,35					
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100				100			88,10		88,10						
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50				30,00			16,99		56,63						
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60				50,00			52,15		100						
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100				100			73,33		73,33						
2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				9.146.909.100				1.758.638.000	1.529.508.700		1.523.037.242		99,58					
2.16.0 3.2.01 .02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	IP Publik, Domain Sub domain	5	423.215.000			1	90.000.000	81.908.100	1	77.696.450	100	94,86	1	77.696.450			
2.16.0 3.2.01 .03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Mbps	800	8.723.694.100			700	1.668.638.000	1.447.600.600	800	1.445.340.792	100	99,84	800	1.445.340.792			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.303.227.860				1.262.362.000	1.319.127.800		1.278.603.568		96,93					
2.16.0 3.2.02 .03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Bulan	60	1.417.844.400			12	70.000.000	67.355.900	12	66.765.396	100	99,12	12	66.765.396			
2.16.0 3.2.02 .04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Paket	5	568.349.230			1	80.000.000	67.940.000	1	66.989.500	100	98,60	1	66.989.500			
2.16.0 3.2.02 .07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Apl.	462	1.175.464.500			462	121.362.000	224.904.600	512	222.023.138	100	98,72	512	222.023.138			
2.16.0 3.2.02 .08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, Terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan DRC (Disaster Recovery Centre)	Paket	1	2.156.105.730			1	186.000.000	312.753.700	1	311.212.796	100	99,51	1	311.212.796			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2.16.0 3.2.02 .09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan e-government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung	Bulan	60	1.257.725.500			12	660.000.000	508.022.300	12	474.868.392	100	93,47	12	474.868.392				
2.16.0 3.2.02 .10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Bulan	60	727.738.500			12	145.000.000	138.151.300	12	136.744.346	100	98,98	12	136.744.346				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.03													100							
												Predikat	Sangat Tinggi							
2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL				1.520.939.600				400.000.000	193.611.400		185.941.315		96,04						
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100		100		100			66,67		66,67							
2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.520.939.600				400.000.000	193.611.400		185.941.315		96,04						
2.20.0 2.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Dok.	23	1.118.056.400			3	320.000.000	133.054.700	3	128.726.751	100	96,75	3	128.726.751				
2.20.0 2.2.01 .03	Membangun Metadata Statistik Sektor	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Dok.	3	135.227.700			1	15.000.000	14.215.700	1	13.785.250	100	96,97	1	13.785.250				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
2.20.0 2.2.01 .06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya 1 data dan 1 peta di Kabupaten Temanggung	Keg.	1	267.655.500			1	65.000.000	46.341.000	1	43.429.314	100	93,72	1	43.429.314						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.20.02													100									
												Predikat	Sangat tinggi									
2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				632.825.350				165.000.000	90.817.800		68.425.960		75,34								
		Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	19,5		10,3		12,5			20,59		100									
2.21.0 2.2.01	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				632.825.350				165.000.000	90.817.800		68.425.960		75,34								
2.21.0 2.2.01 .03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya sistem kemanan informasi	Keg.	1	433.757.050			1	75.000.000	51.987.000	1	39.853.500	100	76,66	1	39.853.500						

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini sebagian besar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Perubahan Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun 2021 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pelayanan Informasi Publik
 - e. Layanan Hubungan Media
 - f. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - h. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - i. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - j. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - k. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - l. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - m. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - n. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - o. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - p. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - q. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - r. Membangun Metadata Statistik Sektora
 - s. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
 - t. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- u. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - v. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - w. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - y. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - z. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - aa. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - bb. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - cc. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - dd. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ee. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ff. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - gg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - hh. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **86,35%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik;
Capaian kinerja : 99,25 % kategori sangat baik
2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya penyelenggaraan informatika;
Capaian kinerja : 79,51 % kategori baik
3. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
Capaian kinerja : 66,67 % kategori cukup

4. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Capaian kinerja : 100 % kategori memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan IKPD adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Adapun gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2021 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
A INDIKATOR MAKRO DAERAH														
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,22	69,57	69,84	70,16	70,49	69,56	69,57	69,88	-	-	99,13	AT
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	-2,00	2,50	3,50	4,80	5,05	-2,13	3,34	-	-	0	UK
3	Inflasi	%	4,0	1,5	2,50	3,50	4,00	2,66	1,49	1,70	-	-	66,50	AT
4	Pendapatan per Kapita	Nilai	27,5	27,23	27,68	28,45	29,57	28,05	27,23	27,70	-	-	93,68	AT
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,2	3,85	3,50	3,50	3,50	2,99	3,85	2,62	-	-	100	TT
B INDIKATOR SASARAN														
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	2,5	2,75	2,85	2,90	3,00	2,82	3,61	2,78	-	-	92,67	AT
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00	80,03	95,50	89,56	-	-	99,30	AT
C INDIKATOR PROGRAM														
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	9,00	12,00	15,00	18,00	20,00	10,70	13,20	14,66	-	-	73,31	AT
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	15,63	15,63	21,88	-	-	72,92	AT
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80	90	100	100	100	68,33	73,33	73,33	-	-	73,33	AT
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10	-	-	88,10	AT
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	13,23	16,17	16,99	-	-	32,985	UK
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,13	52,27	52,15	-	-	86,91	AT
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	66,67	-	-	66,670	UK
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	7,5	9	12,5	16	19,5	1,3	0,43	15,38	-	-	43,20	AT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 1 (satu) yaitu:

a. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran:

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 2 (dua) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi, 5 (Lima) Lembaga Penyiaran Swasta Radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio, telah memahami dan melaksanakan Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga tidak ditemukan konten-konten isi siaran yang melanggar norma.

Peran aktif dari Dinas Kominfo yang selalu melaksanakan update informasi kepada Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terkait update regulasi dan norma penyiaran untuk dapat diikuti dan dipatuhi oleh Lembaga Penyiaran.

Dinas Kominfo juga rutin mengadakan kegiatan workshop/bimtek dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM penyiaran di Kabupaten Temanggung. Hal ini juga mendorong tercapainya kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap P3SPS.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sering berganti-gantinya SDM penyiar, terutama di Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), sehingga memerlukan update informasi secara kontinu.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus melaksanakan program yang telah berjalan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan isi siaran.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 6 (enam) terdiri dari:

a. Persentase PPID badan publik yang aktif

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemahaman pengelola dan pelaku PPID Badan Publik, baik OPD, Kecamatan dan Desa, baik substansial terkait Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maupun pemahaman teknis, terkait dengan pengelolaan dokumen dan informasi, layanan terhadap permohonan informasi dan pengelolaan website dan dashboard PPID.

PPID Utama Kabupaten Temanggung, pada tahun 2021 membuat inovasi berupa system yang dapat memonitor updating data dan informasi pada dashboard PPID Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu SiMONEV-KIP, yang sangat membantu dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah mutasi pegawai yang menjadi pengelola/admin PPID pada Badan Publik yang mengakibatkan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi dimulai dari awal kembali.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penguatan kapasitas SDM pengelola dan layanan Keterbukaan Informasi PUblik (KIP) pada PPID Badan Publik. Hal-hal terkait PPID tidak diserahkan kepada satu orang saja, tetapi tim, sehingga apabila mutasi, pemahaman tentang PPID tidak menjadi dari awal lagi. Direncanakan ke depan akan diadakan KIP Award tingkat Kabupaten Temanggung untuk memicu dan memacu Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Semangat masyarakat untuk mengembangkan ilmu dalam memajukan kelompoknya dengan teknologi digital terutama dalam penyampaian informasi kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih harus tetap didorong dan dibimbing dalam menginformasikan kegiatan kelompoknya ke masyarakat luas melalui Sosial Media.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tetap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat secara berkesinambungan, mengaktifkan kelompok informasi masyarakat yang belum aktif di wilayah Kabupaten Temanggung.

c. Persentase ketersediaan akses internet publik

Ketersediaan akses internet publik pada akhir triwulan 4 tahun 2021 sebesar 73,33% sehingga masuk pada kategori Upaya Keras dalam mencapai target Kinerja Perangkat Daerah. Perlu diketahui bahwa area publik yang menjadi target merupakan tempat – tempat umum berupa kantor layanan publik, taman, pasar, wisata daerah dan area publik di wilayah urban yaitu citywalk Kabupaten Temanggung. Dari 60 titik lokasi area publik, 44 titik telah terlayani internet publik pada tahun 2020. Sementara 16 titik lainnya yang semula akan dicukupi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kendala sehingga direncanakan akan dicukupi pada awal tahun 2023.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut terdiri atas factor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah :
 - a) kecukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah

Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi.

- b) tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- c) lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Sementara itu dari sisi non teknis telah direncanakan alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan jaringan untuk memenuhi kebutuhan terselenggaranya hotspot di area publik pada tahun 2023.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut terdiri atas beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun penganggaran Dinas Kominfo mengalami pengurangan cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan penambahan peralatan pada lokasi hotspot area publik. Bahkan hotspot area publik eksisting dilakukan pembatasan layanan untuk menghindari kerumunan di area publik demi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 - b) beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada

citywalk, taman – taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai.

c) beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

a) hasil dari pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian peralatan yang rusak dan hilang akan dicukupi pada tahun 2023.

b) lokasi area publik yang saat ini belum terlayani hotspot akses internet publik akan dilakukan koneksi jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023.

c) Semua proses penggantian, perbaikan dan penambahan akses baru dilaksanakan pada awal tahun Anggaran 2023 setelah ditetapkannya APBD TA 2023.

d. Persentase ketersediaan jaringan intranet

Ketersediaan jaringan intranet pada dasarnya adalah jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2019 s.d 2021 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Dari target 395 kantor Pemerintahan dan layanan Pemerintah telah terhubung dengan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung

sejumlah 333 kantor yang terdiri atas Bupati/Pengayoman, Kantor Perangkat daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT/eksUPT dan Kantor Pelayanan Pemerintah. 62 Kantor belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang keseluruhannya merupakan Kantor Pemerintah Desa. Kantor Pemerintah Desa yang belum terhubung dengan jaringan Internet Pemkab bukan berarti tidak memiliki jaringan internet, namun justru dikarenakan telah memiliki jaringan internet secara mandiri dengan anggaran sendiri maka tidak melakukan permohonan koneksi jaringan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo. Sehingga secara status jaringan tidak tercover oleh jaringan intra.

- 1) Faktor pendorong indikator ketersediaan jaringan intranet secara teknis adalah :
 - a) Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah desa tersebut.
 - b) Dari sisi kemampuan dan *occupancy* kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa tersebut.
 - c) Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir Kantor-Kantor Pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala Kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan local Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum adanya kebijakan yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif.

Aplikasi internal masih menggunakan jalur internet karena dengan alasan untuk kemudahan akses meskipun memiliki resiko kerawanan keamanan data. Hal ini menjadikan Kantor Desa yang telah memiliki jaringan internet secara mandiri di luar jaringan Pemerintah Kabupaten tidak begitu membutuhkan jaringan intra Pemerintah dalam melakukan proses kerja dan pelayanan.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
 - a) penegasan kebijakan beragam aplikasi yang bersifat internal dengan menggunakan jalur tertutup / jaringan intra Pemerintah sehingga ada jaminan keamanan data.
 - b) Pemanfaatan jaringan intra pemerintah yang didukung dengan kapasitas penyimpanan besar untuk memberikan layanan penyimpanan *cloud* bagi data pelayanan kependudukan di desa. Hal ini diharapkan akan mendorong antusias Pemerintah Desa dalam pemanfaatan jaringan intra Pemerintah.
 - c) Pemanfaatan VPN (Virtual Private Network) menjadi pilihan terakhir untuk mengcover kebutuhan jaringan intra bagi Kantor Pemerintah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. Jika VPN telah efektif berlaku untuk kebutuhan jaringan tertutup, maka secara keseluruhan kantor Pemerintahan telah tersedia jaringan intranet.
- e. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis pada masing-masing perangkat daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya peran serta dari pengguna aplikasi di

dalam proses implementasi pada pelaksanaan penerapan teknologi informasi.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah umpan balik dari pengguna aplikasi pada setiap proses implementasi sistem informasi sehingga akan ada tindak lanjut dalam pelaksanaan penerapan teknologi informasi.

f. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya semakin banyaknya aplikasi dan web yang dikelola oleh Dinas Kominfo yang memerlukan pengamanan informasi sehingga aplikasi yang dijalankan benar benar sudah melalui tes/pengujian pengamanan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya Peralatan pendukung kegiatan Pengamanan Informasi seperti Komputer/Laptop dengan spesifikasi yang memadai untuk melaksanakan Pentest terhadap aplikasi atau web di lingkup pemerintah Daerah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dengan BSSN untuk dapat melaksanakan kegiatan ITSA setiap tahun dan Daerah menyediakan anggaran untuk pelaksanaannya.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 (dua) terdiri dari:

a. Persentase sistem informasi yang terintegrasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah ketersediaan sumberdaya manusia maupun infrastruktur sistem informasi dilingkungan pemerintah kabupaten Temanggung.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terdapat sistem informasi/aplikasi dari beberapa perangkat daerah yang dibangun oleh pihak ketiga didalam pengelolaan server, aplikasi dan *database* tidak diserahkan sepenuhnya kepada tim teknologi

informasi internal daerah sehingga kesulitan dalam proses integrasi data. Disamping itu penghambat indikator yang lain adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan data terpusat tingkat nasional berpengaruh terhadap proses integrasi di daerah. Terdapat aplikasi-aplikasi duplikasi sehingga menjadi pembagi yang banyak dalam proses integrasi, misal :

- a) SID (Sistem Informasi Desa) jumlah aplikasi 1, tetapi di duplikasi menjadi 266 aplikasi (sesuai jumlah desa).
 - b) SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas) jumlah aplikasi 1, tetapi di duplikasi menjadi 26 aplikasi (sesuai jumlah puskesmas).
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah rasionalisasi data aplikasi sesuai dengan jumlah aplikasi yang dikembangkan bukan berdasarkan jumlah duplikasi dari aplikasi yang dikembangkan. Sebagai contoh :
- a) SID jumlah aplikasi 1;
 - b) SIMPUS jumlah aplikasi 1;

Dengan rasionalisasi data aplikasi yang dikembangkan akan meminimalisir bilangan pembagi sistem informasi yang terintegrasi.

Disamping itu perlu pemantapan dan koordinasi antar perangkat daerah untuk memberikan sepenuhnya dalam pengelolaan server, aplikasi dan database yang dibangun oleh pihak ketiga kepada tim Teknologi Informasi internal sehingga bisa dilakukan analisa terhadap data sebagai langkah awal proses integrasi. Disamping itu, perlu dilakukan standarisasi platform dalam pengembangan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah bahwa data makro daerah secara rutin tersedia melalui kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung setiap tahunnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bahwa proses perhitungan data makro daerah dilakukan dengan kegiatan statistik dimana data tersebut menggambarkan keadaan di lapangan untuk tahun sebelumnya (data n-1), sehingga seringkali tidak sinkron dengan jadwal evaluasi pembangunan dilingkup pemerintah daerah, hal ini menyebabkan ada jeda waktu dimana data makro daerah yang dibutuhkan belum tersedia saat itu.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk meminta bantuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung menyediakan data makro daerah sesuai jadwal evaluasi pembangunan di kabupaten Temanggung dengan angka proyeksi atau perhitungan sementara, agar tidak digunakan data makro daerah tahun sebelumnya (data n-2) untuk evaluasi pembangunan yang dievaluasi saat ini (data n-1).

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data Makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Makro Daerah

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report*

1990). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) *Kependudukan*

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan IPM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2) *Kesehatan*

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup.

3) *Pendidikan*

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM).

4) *Ekonomi*

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5) *Kemiskinan*

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

6) *Ketenagakerjaan*

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Berdasarkan perhitungan sementara nilai IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 69,88 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 2.3
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

TAHUN	IPM
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,83
2019	69,56
2020	69,57
2021	69,88

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami trend kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

b. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan

berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakatpun akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13
2019	2,66	2,81	2,72
2020	2,66	1,56	1,68
2021	2,66	1,7	1,87

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung
Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung tidak bisa menghitung nilai inflasi karena bukan merupakan Kabupaten yang ditunjuk dalam penghitungan Survei Biaya Hidup (SBH) di Provinsi Jawa Tengah

Angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 dalam perkembangannya cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi. Dalam satu

dasawarsa terakhir, selaras juga dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 persen.

Adapun inflasi terendah Kabupaten Temanggung, selama 5 tahun terakhir, adalah sebesar 2,42 persen terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2021 inflasi di Jawa Tengah maupun Nasional mengalami peningkatan, yaitu untuk Jawa Tengah sebesar 1,7 persen dan untuk Nasional sebesar 1,87 persen. Dapat dilihat bahwa untuk Jawa Tengah mengalami inflasi yang lebih rendah daripada Nasional.

Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung tidak bisa menghitung nilai inflasi karena Kabupaten Temanggung bukan merupakan Kabupaten yang ditunjuk dalam penghitungan Survei Biaya Hidup (SBH) di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.5
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan 2010, Tahun 2016-2021

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2016	17.548.930,01	8,73	13.116.363,64	5,02
2017	18.807.712,01	7,17	13.776.254,81	5,03
2018	20.254.482,86	7,69	14.483.255,21	5,13
2019	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05
2020	21.557.95 (Miliar)	0,42	14.890,75 (Miliar)	-2,13
2021*	21.557.95 (Miliar)	0,42	14.890,75 (Miliar)	-2,13

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

* Data tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, menggunakan angka PDRB atas dasar konstan dikarenakan PDRB atas harga berlaku masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Penggunaan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008), yaitu standar internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.

Pada tahun 2020 besaran PDRB menurut harga konstan di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai 14.890,75 miliar rupiah. Angka itu menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya yang mencapai 15.214,058 (miliar) rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 perekonomian Temanggung mengalami perlambatan ekonomi atau kontraksi sebesar -2,13 persen. Penurunan tersebut sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah berupa Pembatasan Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (WFH),

School From Home and Stay at Home yang secara langsung membatasi interaksi dan pergerakan masyarakat.

Dampak pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia awal Maret 2020 juga sangat berpengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku sebesar 21.557,95 milyar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 91,04 milyar rupiah.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2016	5,02	5,27	5,03
2017	5,03	5,27	5,07
2018	5,13	5,32	5,17
2019	5,05	5,41	5,02
2020	-2,13	-2,65	-2,07
2021 *	-2,13	-2,65	-2,07

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

* Data Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 untuk Kabupaten Temanggung masih sama dengan tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional mengalami perlambatan ekonomi sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar -2,13 persen lebih rendah dari Nasional yang sebesar -2,07, namun masih lebih tinggi daripada Jawa Tengah yang sebesar -2,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 belum dapat disajikan dikarenakan perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS Temanggung menggunakan data n-1 sehingga baru bisa diketahui di tahun 2021.

d. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro. Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2021

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2016	23.321.271,11	7,77
2017	24.775.416,01	6,24
2018	26.455.905,95	6,78
2019	28.052.969,06	6,04
2020	27.702.750,00	-1.21
2021*	27.702.750,00	-1.21

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan, secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada

juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

e. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016-2021

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2016	NA	4,53	5,61
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,97 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,24, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2,99, pada tahun 2020 menjadi 3,85 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,62. Seperti halnya di Kabupaten Temanggung, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Jawa Tengah maupun nasional juga mengalami fluktuasi masing-masing di angka 5,95 dan 6,49. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 di angka 2,62% artinya pada tahun 2021, diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

f. Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen

terendah kurang dari 12 persen;

- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 2.9

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	40% Bawah	16.56	18.34	18.39	17,54	18,78
2	40% Tengah	36.50	36.52	34.61	36,86	35,54
3	20% Atas	46.94	45.14	47.00	45,60	45,68

Sumber: Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2021 sudah bisa dikatakan meningkat kesejahteraannya ditandai dengan porsi pendapatan yang meningkat dari tahun 2020 menjadi sejumlah 18,78 persen, akan tetapi porsi pendapatan yang mereka terima masih jauh dibawah kelompok berpenghasilan menengah yang menerima sejumlah 35,54 persen dari total pendapatan penduduk secara keseluruhan, dan jauh dibawah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mendapatkan porsi 45,68 persen.

2. Indikator Sasaran Daerah

- a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

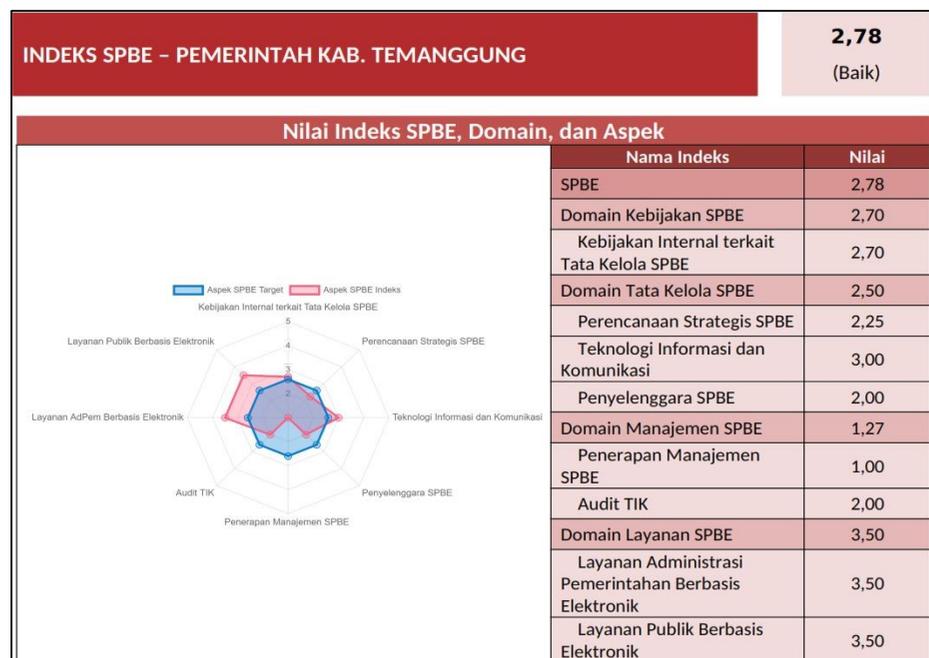
Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	1,84	2,82	3,61	2,78

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2021



Gambar 2.1 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi

dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode:

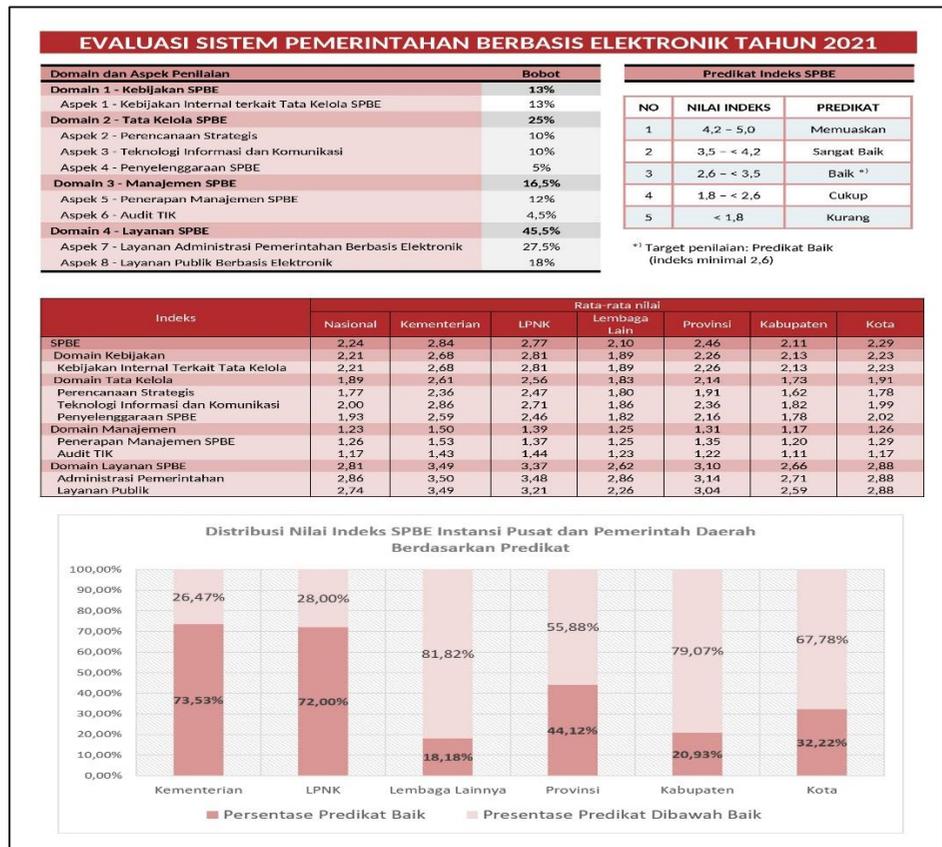
- 1) Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- 2) Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
- 3) Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Tabel 2.12
Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian



b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (*Self Assesment Quesionnaire*)

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program, dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian *website*;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.13
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten
Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,09	70,8	77,9	80,03	95,5	89,56
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu enam tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel berikut ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi kepada kabupaten/kota pada tahun 2021.

Tabel 2.14

Nilai Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2021

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2021		
BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
KOTA SURAKARTA	96,00	INFORMATIF
KABUPATEN DEMAK	95,71	INFORMATIF
KABUPATEN KEBUMEN	95,09	INFORMATIF
KABUPATEN WONOGIRI	94,46	INFORMATIF
KABUPATEN KARANGANYAR	94,15	INFORMATIF
KABUPATEN BATANG	93,42	INFORMATIF
KABUPATEN BANYUMAS	93,21	INFORMATIF
KOTA SEMARANG	91,56	INFORMATIF
KABUPATEN TEMANGGUNG	89,56	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN KLATEN	88,96	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN KUDUS	88,44	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN WONOSOBO	84,40	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PURBALINGGA	83,96	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN KENDAL	82,96	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN CILACAP	80,85	MENUJU INFORMATIF

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

3. Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemerin g-katan	5	26	38	45	50
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	335	341	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemerin g-katan	1,4%	7,3%	11,34 %	13,20%	14,66 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.16 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 sd. 2021

Tabel 2.16
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	Aktif	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Tembarak	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
33	Kecamatan Kedu	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
34	Kecamatan Bulu	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
36	Kecamatan Candiroti	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-	-	-	Aktif
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
41	Kecamatan Tretap	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-	-	-	Aktif
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-	-	-	Aktif
46	Kecamatan Bansari	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	-	-	-	-	-
48	Kelurahan Temanggung II	-	-	-	-	-
49	Kelurahan Butuh	-	-	-	-	-
50	Kelurahan Jampiroso	-	-	-	-	-
51	Kelurahan Jampirejo	-	-	-	-	-
52	Kelurahan Kertosari	-	-	-	-	-
53	Kelurahan Banyuurip	-	-	-	-	-
54	Kelurahan Kowangan	-	-	-	-	-
55	Kelurahan Jurang	-	-	-	-	-
56	Kelurahan Sidorejo	-	-	-	-	-
57	Kelurahan Walitelon utara	-	-	-	-	-
58	Kelurahan Walitelon selatan	-	-	-	-	-
59	Kelurahan Tlogorejo	-	-	-	-	-
60	Kelurahan Manding	-	-	-	-	-
61	Kelurahan Kebonsari	-	-	-	-	-
62	Kelurahan Mungseng	-	-	-	-	-
63	Kelurahan Purworejo	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
64	Kelurahan Giyanti	-	-	-	-	-
65	Kelurahan Madureso	-	-	-	-	-
66	Kelurahan Kranggan	-	-	-	-	-
67	Kelurahan Parakan wetan	-	-	-	-	-
68	Kelurahan Parakan kauman	-	-	-	-	-
69	Kelurahan Manggong	-	-	-	-	-
70	Desa Joho	-	-	-	Aktif	Aktif
71	Desa Guntur	-	-	-	-	-
72	Desa Lungge	-	-	-	Aktif	Aktif
73	Desa Mudal	-	-	-	-	-
74	Desa Gilingsari	-	-	-	-	-
75	Desa Nampirejo	-	-	-	-	-
76	Desa Tlogomulyo	-	-	-	-	-
77	Desa Candisari	-	-	-	-	-
78	Desa Sriwungu	-	-	-	-	-
79	Desa Langgeng	-	-	-	-	-
80	Desa Tanjungsari	-	-	-	-	-
81	Desa Losari	-	-	-	-	-
82	Desa Balerejo	-	-	-	-	-
83	Desa Kerokan	-	-	-	-	-
84	Desa Legoksari	-	-	-	-	-
85	Desa Tililir	-	-	-	-	-
86	Desa Gedegan	-	-	-	-	-
87	Desa Pagersari	-	-	-	-	-
88	Desa Badran	-	-	-	-	-
89	Desa Bengkal	-	-	-	-	-
90	Desa Pare	-	-	-	-	-
91	Desa Nguwet	-	-	-	-	-
92	Desa Ngropoh	-	-	-	-	-
93	Desa Pendowo	-	-	-	-	-
94	Desa Sanggrahan	-	-	-	-	-
95	Desa Klepu	-	-	-	-	-
96	Desa Kemloko	-	-	-	-	-
97	Desa Gentan	-	-	-	-	-
98	Desa Kramat	-	-	-	-	-
99	Desa Purwosari	-	-	-	-	-
100	Desa Tembarak	-	-	-	-	-
101	Desa Menggoro	-	-	-	-	-
102	Desa Purwodadi	-	-	-	-	-
103	Desa Wonokerso	-	-	-	-	-
104	Desa Kemloko	-	-	-	-	-
105	Desa Gandu	-	-	-	-	-
106	Desa Botoputih	-	-	-	-	-
107	Desa Tawangsari	-	-	-	-	-
108	Desa Greges	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
109	Desa Krajan	-	-	-	-	-
110	Desa Jragan	-	-	-	-	-
111	Desa Drono	-	-	-	-	-
112	Desa Banaran	-	-	-	-	-
113	Desa Selopampang	-	-	-	-	-
114	Desa Tanggulanom	-	-	-	-	-
115	Desa Jetis	-	-	-	-	-
116	Desa Salamrejo	-	-	-	-	-
117	Desa Ngaditirto	-	-	-	-	-
118	Desa Bulan	-	-	-	-	-
119	Desa Kacepit	-	-	-	-	-
120	Desa Gambasan	-	-	-	-	-
121	Desa Bumiayu	-	-	-	-	-
122	Desa Kebonagung	-	-	-	-	-
123	Desa Bagus	-	-	-	-	-
124	Desa Plumbon	-	-	-	-	-
125	Desa Pringsurat	-	-	-	-	-
126	Desa Kebumen	-	-	-	-	-
127	Desa Soropadan	-	-	-	-	-
128	Desa Kupon	-	-	-	Aktif	Aktif
129	Desa Karangwuni	-	-	-	-	-
130	Desa Gowak	-	-	-	-	-
131	Desa Rejosari	-	-	-	-	-
132	Desa Pingit	-	-	-	-	-
133	Desa Klepu	-	-	-	-	-
134	Desa Soborejo	-	-	-	-	-
135	Desa Nglorok	-	-	-	-	-
136	Desa Pagergunung	-	-	-	-	-
137	Desa Wonokerso	-	-	-	-	-
138	Desa Ngipik	-	-	-	-	-
139	Desa Kaloran	-	-	-	-	-
140	Desa Tlogowungu	-	-	-	Aktif	Aktif
141	Desa Gandon	-	-	-	-	-
142	Desa Tleter	-	-	-	-	-
143	Desa Getas	-	-	-	-	-
144	Desa Kalimanggis	-	-	-	-	-
145	Desa Tempuran	-	-	-	-	-
146	Desa Kemiri	-	-	-	-	-
147	Desa Geblog	-	-	-	-	-
148	Desa Tegowanuh	-	-	-	-	-
149	Desa Keblukan	-	-	-	-	-
150	Desa Tepusen	-	-	-	-	-
151	Desa Gandulan	-	-	-	-	-
152	Desa Kwarakan	-	-	-	-	-
153	Desa Campursalam	-	-	-	-	-
154	Desa Wanutengah	-	-	-	-	-
155	Desa Nglondong	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
156	Desa Bagus	-	-	-	-	-
157	Desa Dangkel	-	-	-	-	-
158	Desa Mandisari	-	-	-	-	-
159	Desa Tegalroso	-	-	-	-	-
160	Desa Traji	-	-	-	-	-
161	Desa Watukumpul	-	-	-	-	-
162	Desa Ringinanom	-	-	-	-	-
163	Desa Depakharjo	-	-	-	-	-
164	Desa Caturanom	-	-	-	-	-
165	Desa Gelapansari	-	-	-	-	-
166	Desa Sunggingsari	-	-	-	-	-
167	Desa Bansari	-	-	-	-	-
168	Desa Mojosari	-	-	-	-	-
169	Desa Rejosari	-	-	-	-	-
170	Desa Gunungsari	-	-	-	-	-
171	Desa Balesari	-	-	-	-	-
172	Desa Purborejo	-	-	-	-	-
173	Desa Tlogowero	-	-	-	-	-
174	Desa Mranggen Kidul	-	-	-	-	-
175	Desa Mranggen Tengah	-	-	-	-	-
176	Desa Candisari	-	-	-	-	-
177	Desa Campuranom	-	-	-	-	-
178	Desa Gentingsari	-	-	-	-	-
179	Desa Tanurejo	-	-	-	-	-
180	Desa Kledung	-	-	-	-	-
181	Desa Kalirejo	-	-	-	-	-
182	Desa Paponan	-	-	-	-	-
183	Desa Jeketro	-	-	-	-	-
184	Desa Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-
185	Desa Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-
186	Desa Tlahap	-	-	-	-	-
187	Desa Petarangan	-	-	-	-	-
188	Desa Canggal	-	-	-	-	-
189	Desa Jambu	-	-	-	-	-
190	Desa Kruwisan	-	-	-	-	-
191	Desa Tuksari	-	-	-	-	-
192	Desa Kedu	-	-	-	-	-
193	Desa Candimulyo	-	-	-	-	-
194	Desa Salamsari	-	-	-	-	-
195	Desa Danurejo	-	-	-	-	-
196	Desa Mojotengah	-	-	-	-	-
197	Desa Karangtejo	-	-	-	-	-
198	Desa Mergowati	-	-	-	-	-
199	Desa Kutoanyar	-	-	-	-	-
200	Desa Kundisari	-	-	-	-	-

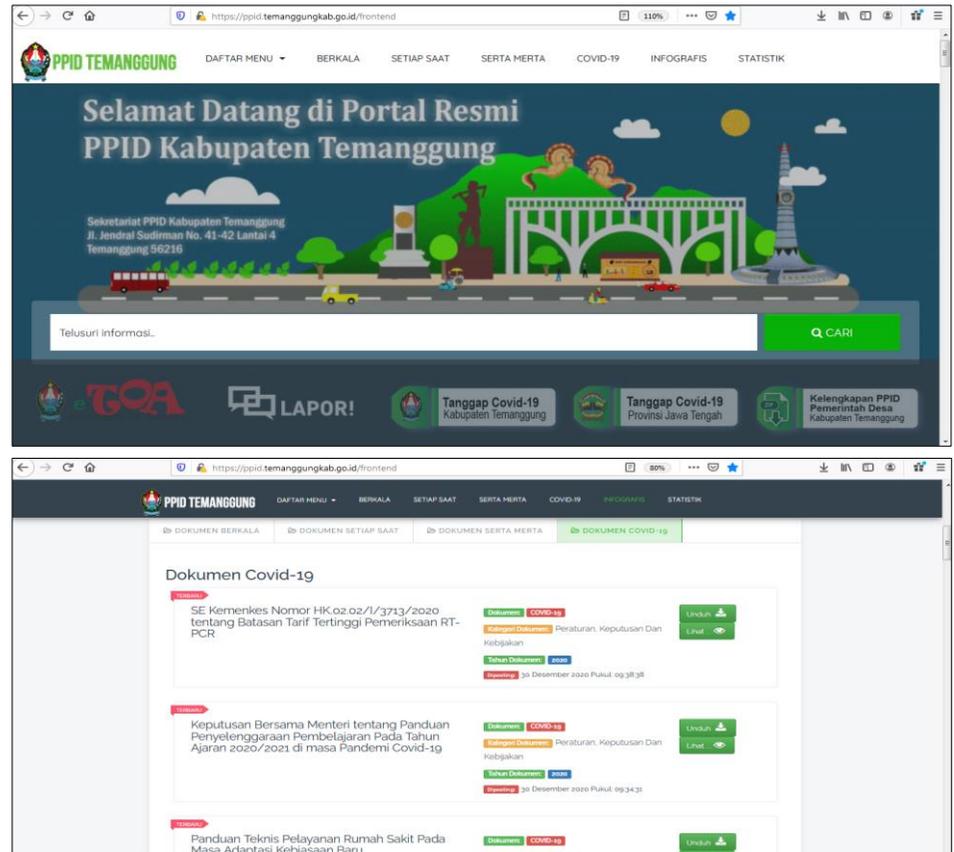
No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
201	Desa Ngadimulyo	-	-	-	-	-
202	Desa Gondangwayang	-	-	-	-	-
203	Desa Bandunggede	-	-	-	-	-
204	Desa Tegalsari	-	-	-	-	-
205	Desa Bojonegoro	-	-	-	-	-
206	Desa Bulu	-	-	-	-	-
207	Desa Tegalurung	-	-	-	-	-
208	Desa Campursari	-	-	-	-	-
209	Desa Gandurejo	-	-	-	-	-
210	Desa Gondosuli	-	-	-	-	-
211	Desa Ngimbrang	-	-	-	-	-
212	Desa Putat	-	-	-	-	-
213	Desa Danupayan	-	-	-	-	-
214	Desa Mondoretno	-	-	-	-	-
215	Desa Pandemulyo	-	-	-	Aktif	Aktif
216	Desa Pasuruhan	-	-	-	-	-
217	Desa Pakurejo	-	-	-	-	-
218	Desa Tegalrejo	-	-	-	-	-
219	Desa Malangsari	-	-	-	-	-
220	Desa Pagergunung	-	-	-	-	-
221	Desa Wonosari	-	-	-	-	-
222	Desa Bansari	-	-	-	-	-
223	Desa Wonotirto	-	-	-	-	-
224	Desa Pengilon	-	-	-	-	-
225	Desa Kandangan	-	-	-	-	-
226	Desa Baledu	-	-	-	-	-
227	Desa Caruban	-	-	-	-	-
228	Desa Wadas	-	-	-	-	-
229	Desa Samiranan	-	-	-	-	-
230	Desa Ngemplak	-	-	-	Aktif	Aktif
231	Desa Kembangsari	-	-	-	-	-
232	Desa Gesing	-	-	-	-	-
233	Desa Margolelo	-	-	-	-	-
234	Desa Blimbing	-	-	-	-	-
235	Desa Kedungumpul	-	-	-	-	-
236	Desa Rowo	-	-	-	-	-
237	Desa Malebo	-	-	-	-	-
238	Desa Tlogopucang	-	-	-	-	-
239	Desa Kedawung	-	-	-	-	-
240	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-
241	Desa Candiroto	-	-	-	-	-
242	Desa Lampuyang	-	-	-	-	-
243	Desa Canggal	-	-	-	-	-
244	Desa Kentengsari	-	-	-	-	-
245	Desa Ngabeyan	-	-	-	-	-
246	Desa Bantir	-	-	-	-	-
247	Desa Krawitan	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
248	Desa Muntung	-	-	-	-	-
249	Desa Batursari	-	-	-	-	-
250	Desa Mento	-	-	-	-	-
251	Desa Muneng	-	-	-	-	-
252	Desa Plosogaden	-	-	-	-	-
253	Desa Sidoharjo	-	-	-	-	-
254	Desa Gunungpayung	-	-	-	-	-
255	Desa Bejen	-	-	-	-	-
256	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-
257	Desa Jlegong	-	-	-	-	-
258	Desa Prangkokan	-	-	-	-	-
259	Desa Lowungu	-	-	-	-	-
260	Desa Larangan Luwok	-	-	-	-	-
261	Desa Congkrang	-	-	-	-	-
262	Desa Kebondalem	-	-	-	-	-
263	Desa Kemuning	-	-	-	-	-
264	Desa Selosabrang	-	-	-	-	-
265	Desa Tanjungsari	-	-	-	-	-
266	Desa Petung	-	-	-	-	-
267	Desa Duren	-	-	-	-	-
268	Desa Ngaliyan	-	-	-	-	-
269	Desa Jumo	-	-	-	-	-
270	Desa Jamusan	-	-	-	-	-
271	Desa Kertosari	-	-	-	-	-
272	Desa Giyono	-	-	-	-	-
273	Desa Gununggempol	-	-	-	-	-
274	Desa Padureso	-	-	-	-	-
275	Desa Barang	-	-	-	-	-
276	Desa Jombor	-	-	-	-	-
277	Desa Ketitang	-	-	-	-	-
278	Desa Morobongo	-	-	-	-	-
279	Desa Karangtejo	-	-	-	-	-
280	Desa Sukomarto	-	-	-	-	-
281	Desa Gedongsari	-	-	-	-	-
282	Desa Gemawang	-	-	-	-	-
283	Desa Muncar	-	-	-	-	-
284	Desa Kemiriombo	-	-	-	-	-
285	Desa Ngadisepi	-	-	-	-	-
286	Desa Krempong	-	-	-	-	-
287	Desa Sucen	-	-	-	-	-
288	Desa Karangseneng	-	-	-	-	-
289	Desa Banaran	-	-	-	-	-
290	Desa Kalibanger	-	-	-	-	-
291	Desa Jambon	-	-	-	-	-
292	Desa Tretap	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
293	Desa Donorojo	-	-	-	-	-
294	Desa Nglarangan	-	-	-	-	-
295	Desa Sigedong	-	-	-	-	-
296	Desa Bonjor	-	-	-	-	-
297	Desa Tempelsari	-	-	-	-	-
298	Desa Campurejo	-	-	-	-	-
299	Desa Bojong	-	-	-	-	-
300	Desa Bandungan	-	-	-	-	-
301	Desa Simpar	-	-	-	-	-
302	Desa Tlogo	-	-	-	-	-
303	Desa Wonoboyo	-	-	-	-	-
304	Desa Pateken	-	-	-	-	-
305	Desa Pitrosari	-	-	-	-	-
306	Desa Purwosari	-	-	-	-	-
307	Desa Kebonsari	-	-	-	-	-
308	Desa Semen	-	-	-	-	-
309	Desa Tening	-	-	-	-	-
310	Desa Wonocoyo	-	-	-	-	-
311	Desa Pesantren	-	-	-	-	-
312	Desa Rejosari	-	-	-	-	-
313	Desa Tawangsari	-	-	-	-	-
314	Desa Wates	-	-	-	-	-
315	Desa Cemoro	-	-	-	-	-
316	Desa Ngadirejo	-	-	-	-	-
317	Desa Gondang Winangun	-	-	-	-	-
318	Desa Ganduwetan	-	-	-	-	-
319	Desa Ngaren	-	-	-	-	-
320	Desa Mangunsari	-	-	-	-	-
321	Desa Dlimoyo	-	-	-	-	-
322	Desa Purbosari	-	-	-	-	-
323	Desa Campursari	-	-	-	-	-
324	Desa Tegalrejo	-	-	-	-	-
325	Desa Giripurno	-	-	-	-	-
326	Desa Katekan	-	-	-	-	-
327	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-
328	Desa Medari	-	-	-	-	-
329	Desa Karanggedong	-	-	-	-	-
330	Desa Munggangsari	-	-	-	-	-
331	Desa Kataan	-	-	-	-	-
332	Desa Petirejo	-	-	-	-	-
333	Desa Pringapus	-	-	-	-	-
334	Desa Gejagan	-	-	-	-	-
335	Desa Batursari	-	-	-	-	-
336	PDAM Tirta Agung	-	-	-	-	Aktif
337	PD BPR Bank Pasar	-	-	-	-	-
338	PD Apotik Waringin Mulyo	-	-	-	-	-
339	PD BPR BKK Temanggung	-	-	-	-	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
340	PD Aneka Usaha	-	-	-	-	-
341	PD Bhumi Phala Wisata	-	-	-	-	-
Jumlah PPID Aktif		5	26	38	45	50

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung



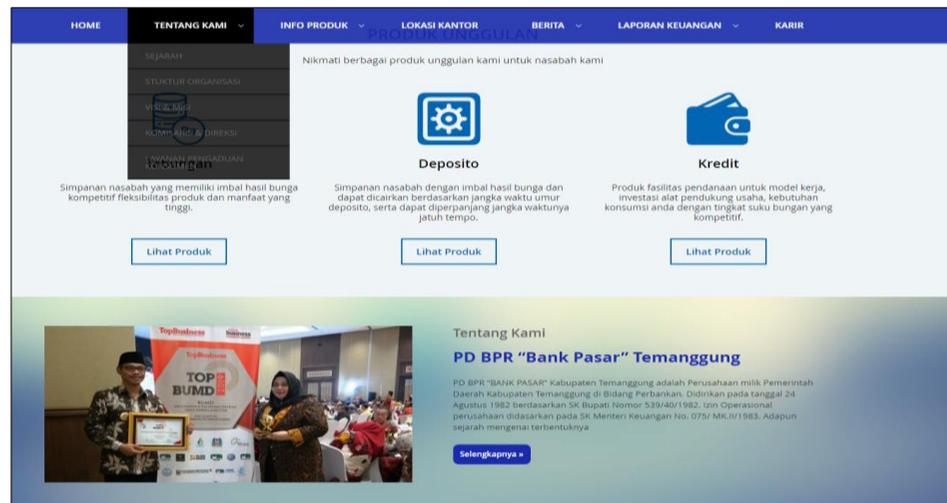
Gambar 2.3
Website PPID Kabupaten Temanggung



Gambar 2.4
Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan



Gambar 2.5
Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa



Gambar 2.6
Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah

b. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta diseminasi kepada masyarakat KIM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	1	2	5	5	7
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	19	32	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	3,2%	6,25 %	15,63 %	15,63 %	21,88 %

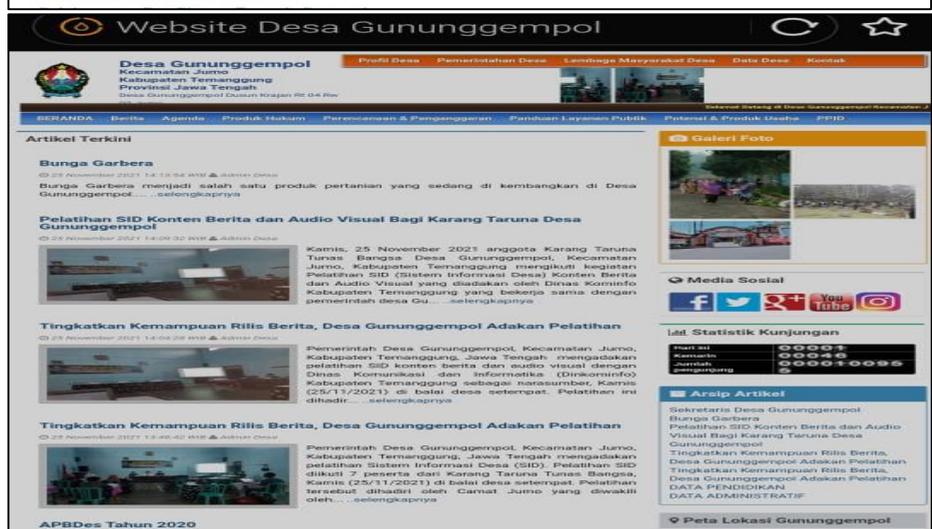
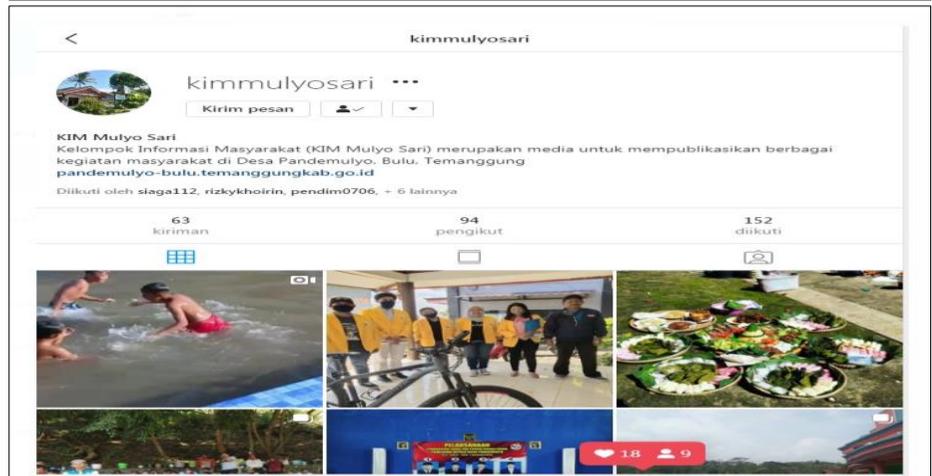
Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.18
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab.
Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN-TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malang Sari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017		✓
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung	2017		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN -TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
		Kec. Bulu			
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018	✓	✓
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018	✓	✓
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
Jumlah				7	27

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung



Gambar 2.7
Media Komunikasi KIM Tingkat Desa

c. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran,

serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma siaran
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	7	8	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	7	8	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1

Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinkominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinkominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten

siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

d. Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinkominfo.

Sampai dengan awal tahun 2020 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2016 s.d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	6	7	25	41	44	44
2	Jumlah area publik	25	25	60	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	24	28	41,6	68,3	73,33	73,33

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Saat ini jumlah area publik yang telah difasilitas akses internet gratis 44 titik. Penambahan sebesar 3 titik dari tahun sebelumnya ditempatkan pada pasar Parakan lantai 1 dan puskesmas Banjarsari Ngadirejo. Terjadinya pandemi *covid-19* selama tahun 2020 beberapa wifi di area publik dimatikan untuk menghindari adanya masyarakat

yang berkerumun di sekitaran area *hotspot* yaitu sejak bulan Maret hingga bulan Agustus.

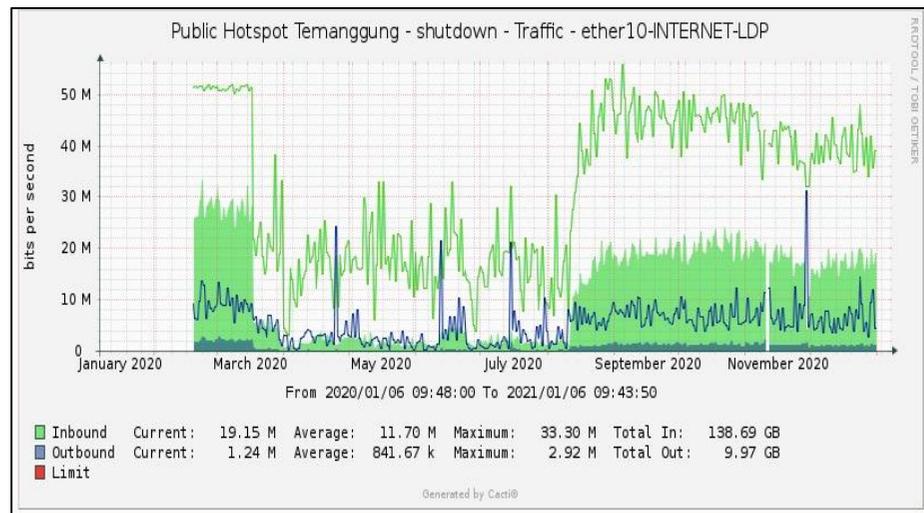
Tabel 2.22
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019		
29	RSUD barat ruang tunggu	2019		
30	Ruang pelayanan Dindukcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - selatan lantai 1	2019	2020	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
33	Pasar Parakan2 - utara lantai 1	2019	2020	Aktif
34	Pasar Parakan3 - selatan lantai 1	2019		
35	Pasar Parakan4 - selatan lantai 2	2019		
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019		
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019		
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019		
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019		
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019	2019	Aktif
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019		
43	Ruang tunggu Puskesmas Banjarsari	2019	2019	Aktif
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019	2019	Aktif
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019	2019	Aktif
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019		
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019		
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019		
50	Ruang tunggu Puskesmas Candiroto	2019		
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019		
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019	2019	Aktif
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonobojo	2019		
54	Ruang tunggu Puskesmas Tretep	2019	2019	Aktif
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019	2019	Aktif
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019	2019	Aktif
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019	2019	Aktif
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019		
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019	2019	Aktif
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
Jumlah		60	60	44

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Layanan internet publik meskipun selama 6 (enam) bulan dimatikan namun tetap banyak diminati selama masa pandemi dengan limitasi per titik adalah 2 Mbps untuk mengurangi tingkat kerumunan. Hingga akhir tahun 2021, penggunaan bandwidth untuk seluruh area mencapai titik maksimal 33.30 Mbps sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.8 tentang grafik okupansi bandwidth internet publik.



Gambar 2.8
Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik

e. Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti *remote login*, *transfer file*, surat elektronik, *World Wide Web* dan *newsgroup*. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung

dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Tabel 2.23
 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab.
 Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	88	146	235	317	324	348
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	22,28 %	36,96 %	59,49 %	80,25 %	82,03 %	88,10 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2021 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.24 berikut ini diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 2.24
 Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten
 Temanggung, Tahun 2021

No	Uraian	2021	Kondisi	
			aktif	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/ Dinas	27	27	-
2	Jumlah Kecamatan	20	20	-
3	Jumlah Kelurahan	23	23	-
4	Jumlah Desa	200	194	6
5	Jumlah UPT/eks UPT	54	53	1
JUMLAH		324	317	7

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

f. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Tabel 2.25
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	5	19	31	61	61	87
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463	512
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	1,3 %	4,7%	6,79 %	13,2 3 %	13,1 7 %	16,99 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem

informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Sistem Informasi yang Terintegrasi

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	2017	1	e-movev
2	sibangda	2017	1	mapatda
3	Lpse	2016	1	sirup
4	Jdih	2018	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	PPID	2020	1	Temanggung Gandem
6	Portal VPN dan SSO	2018	1	sistem informasi lain
7	Dindikpora	2018	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	2017	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	2017	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmpstsp	2018	1	data kependudukan
11	monitorabsen	2017	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	2017	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	2017	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	2018	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	2017	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	2018	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	2018	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	2017	1	simpeg
21	e-peluk ASN	2017	1	simpeg

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
22	mapatda	2017	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	2017	1	mapatda
24	Data	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	layanan kependudukan online	2017	1	data kependudukan
26	e-planning	2018	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	2018	1	e-planning, e-monev
28	sirup	2016	1	lpse
29	e-monev	2018	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	2018	1	gis tataruang
32	SMS	2019	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	2019	26	Data kependudukan
34	e-risalah	2019	1	Jdih
35	Aplikasi Anjab-ABK	2020	1	E-Kinerja
36	e-statistik	2019	1	PPID
37	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	2020	1	Temanggung Gandem
38	Temanggung Gandem	2020	1	e-statistik, santunan kematian
39	Web Corona	2020	1	web PT. DSN
40	E-Office	2020	1	simpeg, jdih
41	E-Keuangan	2020	1	e-budgeting
42	SDS	2020	1	SDS Provinsi Jateng
43	Dashboard SIMPUS	2020	1	simpus masing-masing Puskesmas
44	Retribusi DPUPKP	2020	1	Gis Terintegrasi
45	Layanan 24/7	2020	1	Smart Office DPUPKP
46	SIMBOS	2020	1	SIMBOS Pusat
47	PPDB Online	2020	1	PPDB Pusat

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
48	Aplikasi Pendataan Pemudik	2020	1	data kependudukan
49	SIAK	2020	1	data kependudukan
50	Aplikasi Android Temanggung Gandem	2020	1	Gandem, E-Statistik, PPID, JDIH
51	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	2020	1	data kependudukan
52	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	2020	1	MAPATDA
53	Aplikasi Dashboard Geospasial	2020	1	GIS Tata Ruang
54	Aplikasi SANKA Android	2020	1	Data Kependudukan
55	Aplikasi SANKA Web	2020	1	Data Kependudukan
56	SIM DKD	2020	1	Data Kependudukan
57	SIMRS	2020	1	BPJS
58	SIMPKK	2021	1	Data Kependudukan
59	SIMKB	2021	1	Data Kependudukan
60	E-Kinerja android	2021	1	E-TPP, Monitor Absen
61	JDIH Setwan	2021	1	JDIH BPHN
62	Sinkronisasi Vaksinasi	2021	1	Data Kependudukan, KPCPEN
Jumlah			87	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.27

Detail Sistem Informasi Kabupaten Temanggung

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
1	temanggungkab.go.id	1	Sebuah Portal website Kabupaten Temanggung
2	Simbada	1	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk mengelola Aset di masing-masing instansi
3	sibangda	1	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
4	lpse	1	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5	jdih	1	Aplikasi yang menampilkan dokumentasi dan informasi hukum
6	mail	1	Aplikasi Email Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung
7	sms	1	Aplikasi pengaduan melalui SMS Gateway
8	dindikpora	1	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9	sipd	1	Sistem Informasi / Aplikasi Yang Mendokumentasikan, Mengadministrasikan, Serta Mengolah Data Pembangunan Daerah Menjadi Informasi Yang Disajikan Kepada Masyarakat Dan Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan
10	puskomkref	1	Website puskomkref
11	simwasda.inspektorat	1	Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (SIMWASDA)
12	ppid	1	Aplikasi PPID Utama Pemkab Temanggung
13	dindukcapil	1	Website Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil
14	cellplan	1	Sistem Informasi Pengecekan Koordinat cellplan Menara Telekomunikasi Kabupaten Temanggung
15	perizinan-dpmpstsp	1	Layanan Perizinan online
16	monitorabsen (E-Absensi)	1	Sistem Informasi untuk melakukan monitoring absensi pegawai
17	sipt	1	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Dinas Kesehatan
18	gandem	1	Sistem Informasi Pusat Data Terpadu (Gabungan Data Temanggung)
19	simdkt	1	Sistem Informasi Data Kemiskinan Terpadu (SIMDKT)
20	e-kinerja	1	aplikasi manajemen kinerja pegawai
21	simpeg	1	Aplikasi manajemen kepegawaian
22	Bankdata	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Kumpulan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
			Data Data / Aset Penting Di Pemerintah Kabupaten Temanggung
23	Tata Ruang	1	sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Temanggung
24	e-TPP	1	istem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Tunjangan Pokok Pegawai Di Kabupaten Temanggung
25	Portal Sistem Informasi	1	Portal kumpulan semua Sistem Informasi / Aplikasi yang terdata di Kabupaten Temanggung
26	bkpsdm	1	Portal Sistem Informasi BKPSDM
27	e-retribusi Pasar	1	Layanan Penarikan Retribusi Pasar secara Online
28	inbox.bkd	1	aplikasi pencatatan surat masuk
29	e-peluk ASN	1	aplikasi pelayanan keluhan ASN
30	mapatda	1	Sistem Informasi / Aplikasi Tentang Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Kinerja Integrasi Data
31	sig-mapatda-bppkad	1	Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah berbasis Peta
32	data	1	portal untuk menjembatani pengambilan data dari Bank Data Pembangunan ke Aplikasi Gandem
33	layanan kependudukan online	1	Aplikasi Pelayanan Kependudukan secara Online
34	e-planning	1	sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
35	e-budgeting	1	sistem informasi penyusunan anggaran kegiatan
36	sirup	1	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
37	e-risalah	1	Aplikasi Tentang Pengelolaan Risalah DPRD Kabupaten Temanggung
38	e-monev	1	Aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
39	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	aplikasi yang menampilkan katalog dokumen hukum/ peraturan
40	rupabumi	1	Aplikasi untuk mempermudah pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung
41	GIS Terintegrasi	1	Sistem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Citra Satelit Atau Peta Yang Sudah Terintegrasi Oleh Sistem
42	Portal VPN dan SSO	1	Portal Aplikasi terintegrasi yang menerapkan teknologi VPN
43	mediacenter	1	Website Resmi Media Center Kabupaten Temanggung
44	website kecamatan	20	Website resmi Kecamatan
45	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	266	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
46	Website OPD	23	Website resmi OPD
47	paten-kecamatan	20	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
48	simpus	26	Sistem Informasi Puskesmas
49	web puskesmas	26	Website Resmi Pusat Kesehatan Masyarakat
50	e-Statistik	1	Sistem Informasi / Aplikasi Penyaji Data Statistik Kab. Temanggung Untuk Membantu Memudahkan Pengguna Mengakses Data Secara Cepat Dan Mudah
51	e-Usaha	1	Aplikasi untuk pendataan usaha (DPMPSTP)
52	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	1	Sistem Informasi Santunan Kematian Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
53	Apdul (Schedule)	1	Aplikasi untuk melakukan pengaturan <i>schedule</i> kegiatan
54	Temanggung Gadem	1	System Informasi yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
55	Rekap Pilkades	1	aplikasi untuk rekap cepat Pemilihan Kepala Desa di Kab. Temanggung
56	Web Corona dan Aplikasi Pemudik	2	Website pemantauan Corona di Kabupaten Temanggung
57	Hebat	1	Website himpunan berita Temanggung (Humas)
58	E-Office	1	Aplikasi Surat Elektronik dan Pengelolaan Kearsipan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
59	PPID Pembantu	46	Website resmi PPID Pembantu di Kabupaten Temanggung
60	E-Keuangan	1	Layanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
61	SIRENJA	1	Sistem Informasi Rencana Kerja
62	Evarenbang	1	SISTEM INFORMASI EVALUASI MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
63	Saran Aduan SIMDKT	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Pelaporan Saran Dan Aduan Informasi Data Kemiskinan Yang Ada Di Kabupaten Temanggung
64	Bibliotecha Dinarpus	1	Portal Sistem Informasi katalog buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
65	Wisata Temanggung	1	Website Wisata Temanggung
66	SDS	1	Aplikasi Single Data System
67	Dashboard Dinkes	1	Halaman Dashboard Dinas Kesehatan
68	Dashboard SIMPUS	1	Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat
69	NMS	1	Aplikasi untuk memonitoring jaringan
70	Retribusi DPUPKP	1	Sistem Informasi tentang pelayanan retribusi DPUPKP
71	Layanan 24/7	1	Sistem Informasi Layanan 24/7 DPUPKP
72	SIMBOS	1	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah
73	PPDB Online	1	Portal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Temanggung
74	Website DINSOS	1	Website Resmi Dan Portal Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
75	Website Temanggung TV	1	Website resmi Temanggung TV
76	Aplikasi Pendataan Pemudik	1	Aplikasi untuk pendataan pemudik Temanggung
77	SIAK	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
78	Aplikasi Android Temanggung Gadem	1	Aplikasi android yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
79	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gadem Pol	1	Aplikasi android untuk pelayanan kependudukan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	JML	KETERANGAN
80	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	1	Sistem Informasi untuk mengelola Objek Pajak
81	Aplikasi ANJAB dan ABK	1	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
82	Aplikasi Dashboard Geospasial	1	Aplikasi dashboard yang menampilkan informasi berbasis geospasial
83	Aplikasi SANKA Web	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Website
84	Aplikasi SANKA Android	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Android
85	SIM DKD	1	Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah
86	SIMRS	1	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
87	Siskeudes	1	Sistem Informasi Keuangan Desa
88	Aplikasi Rusunawa	1	Sistem informasi dan Aplikasi pembayaran Rusunawa
89	Sistem informasi pasar (Simpas)	1	Sistem informasi Pasar, Pedagang, Tarif, Kios
90	Sistem Informasi Pendataan Industri (Sinpi)	1	Sistem Informasi untuk Pendataan Industri
91	Sistem informasi Koperasi (Sinkop)	1	Sistem Informasi Koperasi
	JUMLAH	512	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2021

Di Kabupaten Temanggung terdapat 512 Sistem Informasi yang aktif dibawah pemantauan Dinas Kominfo. Beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi dikarenakan sistem informasi yang telah dibangun sebelumnya menggunakan teknologi yang berbeda-beda sehingga mempersulit pengintegrasian antar sistem informasi.

g. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem

informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	20	29	175	185	192	267
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463	512
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	5,3 %	7,2 %	38,38 %	40,13 %	41,47 %	52,15 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.28 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun data sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun
2021

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	temanggungkab.go.id	1	1	1	1	1
2	Simbada	1	1	1	1	1
3	sibangda	1	1	1	1	1
4	lpse	1	1	1	1	1
5	jdih	-	1	1	1	1
6	p2kp	1	1	1	1	1
7	mail	-	1	1	1	1
8	sms	1	1	1	1	1
9	dindikpora	-	1	1	1	1
10	sipd	1	1	1	1	1
11	puskomkref	-	1	1	1	1
12	simwasda.inspektorat	-	1	1	1	1
13	ppid	-	1	1	1	1
14	dindukcapil	-	1	1	1	1
15	cellplan	-	1	1	1	1
16	perizinan-dpmptsp	-	1	1	1	1
17	rsud	-	1	-	-	-
18	monitorabsen	1	1	1	1	1
19	sipt	-	1	1	1	1
20	gandem	-	1	1	1	1
21	simdkt	-	1	1	1	1
22	e-kinerja	1	1	1	1	1
23	simpeg	1	1	1	1	1
24	Bankdata	-	1	1	1	1
25	Gis Tata Ruang	1	1	1	1	1
26	e-TPP	1	1	1	1	1
27	Portal Sistem Informasi	-	1	1	1	1
28	bkpsdm	-	1	1	1	1
29	sivespa	-	1	1	1	1
30	e-retribusi	-	1	1	1	1
31	simelon	-	1	1	1	1
32	inbox.bkd	-	1	1	1	1
33	e-peluk ASN	-	1	1	1	1
34	mapatda	1	1	1	1	1
35	sig-mapatda-bppkad	-	1	1	1	1
36	data	-	1	1	1	1
37	layanan kependudukan online	-	1	1	1	1
38	e-planning	-	1	1	1	1
39	e-budgeting	-	1	1	1	1
40	sirup	1	1	1	1	1
41	e-risalah	-	1	1	1	1
42	e-monev	-	1	1	1	1

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2017	2018	2019	2020	2021
43	sigender	-	1	1	1	1
44	e-dokum (katalog dokumen hukum)	-	1	1	1	1
45	rupabumi	-	1	1	1	1
46	GIS Terintegrasi	-	1	1	1	1
47	Portal VPN dan SSO	-	1	1	1	1
48	mediacenter	-	1	1	1	1
49	musrenbang	-	1	-	-	-
50	website kecamatan	-	18	20	20	20
51	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	14	20	20	25	25
52	Website OPD	-	18	22	22	22
53	paten-kecamatan	-	20	20	20	20
54	simpus	-	24	24	24	24
55	web puskesmas	-	26	26	26	26
56	simpeda	1	-	-	-	-
57	surya	-	-	-	-	-
58	kantaya	-	-	-	-	-
59	simonit	-	-	-	-	-
60	tito.bappeda	-	-	-	-	-
61	dekranasda	-	-	-	-	-
62	e-Statistik	-	-	1	1	1
63	e-Usaha	-	-	1	1	1
64	Santunan Kematian	-	-	1	1	1
65	Apdul (Schedule)	-	-	1	1	1
66	Temanggung Gandem	-	-	1	1	1
67	rekap pilkades	-	-	-	1	1
68	Web corona	-	-	-	1	1
69	Hebat	-	-	-	1	1
70	E-Office	-	-	-	1	1
71	PPID Pembantu	-	-	-	46	46
72	E-Keuangan	-	-	-	1	1
73	SIRENJA	-	-	-	1	1
74	Evarenbang	-	-	-	1	1
75	Saran Aduan SIMDKT	-	-	-	-	-
76	Bibliotecha Dinarpus	-	-	-	1	1
77	Wisata Temanggung	-	-	-	1	1
78	SDS	-	-	-	1	1
79	Dashboard Dinkes	-	-	-	1	1
80	Dashboard SIMPUS	-	-	-	1	1
81	NMS	-	-	-	1	1
82	Retribusi DPUPKP	-	-	-	1	1
83	Layanan 24/7	-	-	-	1	1
84	SIMBOS	-	-	-	1	1
85	PPDB Online	-	-	-	1	1
86	Website DINSOS	-	-	-	1	1
87	Website Temanggung TV	-	-	-	1	1

NO	NAMA SIM	BERFUNGSI OPTIMAL				
		2017	2018	2019	2020	2021
88	Aplikasi Pendataan Pemudik	-	-	-	1	1
89	SIAK	-	-	-	1	1
90	Aplikasi Android Temanggung Gandem	-	-	-	1	1
91	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	-	-	-	1	1
92	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	-	-	-	1	1
93	Aplikasi ANJAB dan ABK	-	-	-	1	1
94	Aplikasi Dashboard Geospasial	-	-	-	1	1
95	Aplikasi SANKA Web	-	-	-	1	1
96	Aplikasi SANKA Android	-	-	-	1	1
97	SIM DKD	-	-	-	1	1
98	SIMSRS	-	-	-	1	1
99	Siskeudes	-	-	-	1	1
	Jumlah	29	175	185	265	267

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

4. Indikator Program Bidang Statistik

a. Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya.

Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 6 (enam) yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen

Tabel 2.30
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Data makro yang tersedia	5	6	6	5	5	4
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	5	5	6
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	71,4 %	85,7 %	87 %	100 %	100 %	66,67 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.31
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Jenis Data	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-

No	Jenis Data	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Laju Inflasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tidak tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	tersedia	tersedia	tersedia	-	-	-
7	Indeks Gini	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	-	-	-
8	Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-	-	-	belum tersedia
9	Pendapatan per kapita	-	-	-	-	-	belum tersedia
10	Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	-	-	-	-	-	tersedia
	TOTAL	5	6	6	5	5	4

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

5. Indikator Program Bidang Persandian

a. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis *web*, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu *bugs* (aplikasi tidak bisa memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan *security vulnerability*. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis *web* memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan IT *Security Assessment*, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko
Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun
2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	5	5	7	14
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	60	68	68	68
3	Tingkat kesiapan penilaian/penge lolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	8,3	7,35	10,29	20,59

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.32 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi mulai tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan melakukan Security Assessment. Pada tahun 2019 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2020 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi akan tetapi tidak bisa dikerjasamakan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah adanya pandemi coronavirus 2019 (*Covid-19*) yang menyebabkan terbatasnya keluar masuk manusia dari satu wilayah ke wilayah lainya. Solusinya yaitu dengan melakukan asesment mandiri.

Dikarenakan keterbatasan SDM di wilayah kabupaten Temanggung untuk melakukan penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung secara mandiri maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini menggandeng PITSI (PT Pilar Teknotama Sinergi) untuk melakukan vulnerability Assesment pada aplikasi situs resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 2.33
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

No	Asal OPD	Nama	Alamat
1	Bag Humas	Website Pemkab	temanggungkab.go.id.temanggungkab.go.id
2	BPKPAD	Simbada	Simbada.temanggungkab.go.id
3	Bag Pembangunan	Sibangda	sibangda.temanggungkab.go.id
4	Bag Pembangunan	LPSE	lpse.temanggungkab.go.id
5	Bag Hukum	JDIH	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	p2kp.temanggungkab.go.id

No	Asal OPD	Nama	Alamat
7	Dinas Kominfo	Mail	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	simpus.temanggungkab.go.id
9	Bag Humas	Sms	sms.temanggungkab.go.id
10	Dindikpora	Dindikpora	dindikpora.temanggungkab.go.id
11	Off	Simonit	simonit.temanggungkab.go.id
12	Bappeda	Sipd	sipd.temanggungkab.go.id
13	Bappeda	tito.bappeda	tito.bappeda.temanggungkab.go.id
14	Off	Dekranasda	dekranasda.temanggungkab.go.id
15	Dinas Kominfo	Puskomkref	puskomkref.temanggungkab.go.id
16	Inspektorat	simwasda.inspektorat	simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id
17	Dinas Kominfo	Ppid	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	Dindukcapil	dindukcapil.temanggungkab.go.id
19	DPMPTSP	Cellplan	cellplan.temanggungkab.go.id
20	DPMPTSP	perizinan-dpmptsp	perizinan-dpmptsp.temanggungkab.go.id
21	BKPSDM	monitorabsen	monitorabsen.temanggungkab.go.id
22	Dinkes	Sipt	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinas Kominfo	website kecamatan	website kecamatan.temanggungkab.go.id
24	Dinsos	web dinsos	web dinsos.temanggungkab.go.id
25	Dinas Kominfo	Gandem	gandem.temanggungkab.go.id
26	Bappeda	Simdkt	simdkt.temanggungkab.go.id
27	Dinpermades	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungkab.go.id
28	Bag Organisasi	e-kinerja	e-kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	Simpeg	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinas Kominfo	Bankdata	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	Bag Organisasi	e-TPP	e-TPP.temanggungkab.go.id

No	Asal OPD	Nama	Alamat
33	Dinas Kominfo	Website OPD	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinas Kominfo	Portal Sistem Informasi	Portal Sistem Informasisisfo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	Bkpsdm	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	Satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	Bppkad	Mapatda	mapatda.temanggungkab.go.id
42	Bppkad	sig-mapatda-bppkad	sig-mapatda-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinas Kominfo	Data	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcapil	layanan kependudukan online	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id
46	Bppkad	e-budgeting	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	Bag. Pembangunan (pusat)	Sirup	sirup.temanggungkab.go.id
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	dekstop base
49	Dinpermades	siskeudes	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	e-risalah.temanggungkab.go.id
51	Bappeda	e-monev	e-monev.temanggungkab.go.id
52	DPPKBPPPA	sigender	sigender.temanggungkab.go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	e-dokum.temanggungkab.go.id
54	Bag. Pemerintahan	rupabumi	rupabumi.temanggungkab.go.id
55	Dinkes	web puskesmas	web puskesmas.temanggungkab.go.id

No	Asal OPD	Nama	Alamat
56	Dinas Kominfo	GIS Terintegrasi	GIS Terintegrasi.temanggungkab.go.id
57	Dinas Kominfo	Portal VPN dan SSO	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinas Kominfo	mediacenter	mediacenter.temanggungkab.go.id
59	Bappeda	musrenbang	musrenbang.temanggungkab.go.id
60	DPMPPTSP	paten-kecamatan	paten-kecamatan.temanggungkab.go.id
61	Dinas Kominfo	website kecamatan	temanggung.temanggungkab.go.id
62	Dinas Kominfo	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	kedungumpul-kandangan.temanggungkab.go.id (sample)
63	Dinas Kominfo	Website OPD	bkpsdm.temanggungkab.go.id
64	Dinas Kominfo	paten-kecamatan	tidak dipublikasi
65	Dinas Kominfo	simpus	dashboardsimpus.temanggungkab.go.id
66	Dinas Kominfo	web puskesmas	puskesmastemanggung.temanggungkab.go.id (sample)
67	Dinas Kominfo	Rekap pilkades	pilkades2020.temanggungkab.go.id
68	Dinas Kominfo	Web corona	corona.temanggungkab.go.id

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.34
 Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung

No	Asal OPD	Nama	Alamat	Tingkat Resiko	Tahun Assesment
1	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id	Sedang	2019
2	BKPSDM	e-tp	e-tp.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
3	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2019
4	Dinhu	Ujikir		Tinggi	2019

No	Asal OPD	Nama	Alamat	Tingkat Resiko	Tahun Assesment
5	BKPSDM	e-kinerja	Kinerja.temanggungekab.go.id	Tinggi	2019
6	Dinkominfo	kominfo	Kominfo.temanggungekab.go.id	sedang	2020
7	Dinkominfo	Jurnalbhumi phala	Jurnalbhumi phala.temanggungekab.go.id	sedang	2020
8	Dinkes	simpus	simpus.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
9	dindikpora	simbos	simbos.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
10	Dinas Kominfo	gandem	gandem.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
11	Bappeda	simdkt	simdkt.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
12	Bag. Organisasi	e-kinerja	e-kinerja.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
13	BKPSDM	simpeg	simpeg.temanggungekab.go.id	Sedang	2021
14	Dinas Kominfo	Bankdata	Bankdata.temanggungekab.go.id	Sedang	2021

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 9 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Persentase PPID badan publik yang aktif

Penyebabnya antara lain:

 - Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai.

- Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023.
- b. Persentase ketersediaan akses internet publik
Hal ini disebabkan karena keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat)
 - c. Persentase ketersediaan jaringan intranet
Hal ini disebabkan karena sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha
 - d. Persentase sistem informasi yang terintegrasi
Hal ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi/aplikasi yang sudah lebih dulu dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah, dengan teknologi dan pengembang yang berbeda sehingga menyulitkan untuk mengintegrasikan antar sistem informasi. Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang memang tidak ada keterkaitan data dengan aplikasi yang lain, sehingga memang belum perlu untuk diintegrasikan.
 - e. Cakupan ketersediaan data makro daerah
Hal ini disebabkan karena proses perhitungan data makro daerah dilakukan dengan kegiatan statistik dimana data tersebut menggambarkan keadaan di lapangan untuk tahun sebelumnya (data n-1), sehingga seringkali tidak sinkron dengan jadwal evaluasi pembangunan dilingkup pemerintah daerah, hal ini menyebabkan ada jeda waktu dimana data makro daerah yang dibutuhkan belum tersedia saat itu.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Masalah ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik, yang menjadi akar permasalahannya antara lain:

- Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 - Masih minimnya SDM di bidang TIK.
- c. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat desa di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
- Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- d. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, hal ini disebabkan karena beberapa masalah antara lain:
- Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidak sesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.125.495.038		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.464.160.238	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.749.103.038		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.749.103.038	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.749.103.038		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.749.103.038	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					316.806.000	
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atribut	Kab. Temanggung	34	setel	11.050.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					-		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	Kab. Temanggung			305.756.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.925.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.784.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	13.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	13.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	9.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	8.425.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	30.284.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	33.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	33.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.967.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.967.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	3.075.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	3.075.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	6.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	98.892.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	98.892.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	68.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kab. Temanggung	1	paket	120.500.000		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kab. Temanggung	2	paket	120.500.000	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.423.300.000		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.496.552.400	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.423.300.000		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5.496.552.400	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung, dan	Kab. Temanggung	12	bulan	3.037.436.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan	Kab. Temanggung	12	bulan	5.081.936.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
		terealsisanya perbaikan tower RT FM							LPPL Radio Temanggung, dan terealsisanya perbaikan tower RT FM					
	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	83.148.000		Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	83.148.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bejen (M) Rp. 210.000.000 Hasil Musrebang Rp. 27.716.000 honor SS	Kab. Temanggung	1	keg.	237.716.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu (M) Rp. 150.000.000,- Terlaksananya pelatihan komputer dan pengelolaan website di Kecamatan Bejen (M) Rp. 60.000.000,- Hasil Musrebang Rp. 27.716.000 honor SS	Kab. Temanggung	3	keg.	266.468.400	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	-		65.000.000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	65.000.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					1.778.578.624		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					2.938.578.624	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.480.564.656		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.690.564.656	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	32.000.000		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.)	Kab. Temanggung	2	Blok IP	32.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.448.564.656		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	800	Mpbs	1.658.564.656	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					298.013.968		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.248.013.968	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	27.322.328		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	27.322.328	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	85.924.656		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	110.924.656	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	12	bulan	184.766.984		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	12	bulan	184.766.984	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	-		-		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan multi media pada kelompok masyarakat	Kab. Temanggung	4	paket	925.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					127.833.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					302.833.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					127.833.000		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					302.833.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	100.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	4	dok.	275.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bln	27.833.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bln	27.833.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					97.760.500		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					97.752.500	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					97.760.500		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					97.752.500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISA KEBUTUHAN								
No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bln	97.760.500		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bln	97.752.500		
TOTAL						9.552.967.162		TOTAL						13.299.876.762	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.33
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Kedu	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu	1 paket	150.000.000
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Bejen	Terlaksananya pelatihan komputer dan pengelolaan website di Kecamatan Bejen	1 paket	60.000.000

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinkominfo Kabupaten Temanggung malakukan inovasi kerja yang dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan akses kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang sudah diterapkan dan sedang dalam persiapan untuk menunjang kinerja Dinkominfo adalah sebagai berikut:

a. E-statistik

E-statistik adalah publikasi data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dalam bentuk digital yang yang dapat diakses untuk kepentingan pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, disamping itu dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi mengenai data statistik. Aplikasi ini terdiri dari dua jenis yaitu *e-statistik* berbasis web yang berisikan data-data statistik sektoral dalam bentuk rekapitulasi dan *e-statistik* yang berbasis android merupakan aplikasi mobile yang dapat diakses lewat *gadget* yang berisikan data-data statistik sektoral dari OPD, instansi vertikal dan instansi swasta dilingkup Kabupaten Temanggung.

b. SiMonev KIP

Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SiMONEV-KIP) PPID Kabupaten Temanggung adalah aplikasi untuk memfasilitasi, memonitor, mengklasifikasi dan memverifikasi updating data dan informasi PPID Badan Publik di Pemkab Temanggung.

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah PPID Badan Publik dalam melaksanakan update informasi, karena dengan aplikasi ini informasi-informasi yang belum dan sudah terupdate dapat secara realtime diketahui.

Dari sisi PPID utama aplikasi juga sangat membantu dalam memantau keaktifan PPID Badan Publik serta mempermudah dan mempercepat dalam mengupdate informasi lingkup Pemkab yang dimiliki, dikelola, dan dikuasai oleh PPID Badan Publik. Misalnya dokumen penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang menjadi tanggungjawab PPID BPKPAD akan segera dapat terupload manakala PPID BPKPAD sudah mengupload melalui aplikasi ini.

c. Saka Milenial

Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika Digital (Saka Milenial) merupakan wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang menyukai kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi terutama bidang pengembangan teknologi komputer membuka kesempatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengikuti kegiatan Pengembangan Teknologi Komputer dengan Krida-krida yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan.

Terdapat 5 Krida yang dapat dipilih bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang akan menggeluti Teknologi Informatika yaitu:

- 1) Literasi Digital Dan Internet.
- 2) Kreasi Animasi Dan Multimedia.
- 3) Inovasi Perangkat Lunak.
- 4) Telemetri dan Robotika.
- 5) Teknologi Jaringan dan Big Data

Dengan adanya Saka Milenial ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital bagi anggota muda dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

d. Implementasi sertifikat elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang diperlukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah dan cukup praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun *dongle*.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

Inovasi yang telah dilaksanakan dan sedang dalam persiapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2020

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-statistik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan Aplikasi statistik	Aplikasi statistik berbasis web	Kemudahan akses informasi statistik kabupaten	Dinkominfo -2019
2	SiMonev	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD		Aplikasi untuk memfasilitasi, memonitor, mengklasifikasi dan memverifikasi updating data dan informasi PPID Badan Publik	Kemudahan akses informasi	Dinkominfo -2021
3	Saka Milenial	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembentukan saka milenial binaan	Wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega pegiat Teknologi Informasi Komunikasi	Terbentuknya saka melineal kwarcab Temanggung sebagai mitra Pemerintah daerah	Dinkominfo -2020

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
						dalam penyebaran informasi	
4	Implementasi sertifikat elektronik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan tanda tangan digital	Tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi	Efisiensi kinerja	Dinkominfo-2019

2.7. Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KIP Award Peringkat IX dengan kategori "Menuju Informatif"	Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung
2	Juara II Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung
3	Dukungan kerjasama dan kontribusi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung	Bupati Temanggung	Kabupaten	Dinkominfo Temanggung

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemenkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional Kemenkominfo fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor.

Arah kebijakan Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;

5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kemenkominfo meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang *berkualitas* adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinkominfo Kabupaten Temanggung ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dimana urusan Dinkominfo diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari urusan komunikasi dan informatika adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2023	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	3,00	3,00
			Nilai keterbukaan informasi publik	Point	96,00	96,00

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Tahun 2023	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi public	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	%	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	%	19,5	19,5

Sumber : Perubahan Renstra Dinkominfo Kab. Temanggung 2019-2023

Kebijakan dan strategi Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinkominfo Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.3
Perbandingan Program dan Kegiatan
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	BELANJA DAERAH	9.552.967.162		BELANJA DAERAH	13.299.876.762	3.746.909.600
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.125.495.038	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.464.160.238	338.665.200
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.749.103.038	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.749.103.038	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.749.103.038		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.749.103.038	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.806.000	316.806.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	11.050.000	11.050.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	305.756.000	305.756.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.925.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.784.200	21.859.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.425.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.284.200	21.859.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.967.000	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.967.000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.075.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.075.000	-

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.892.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.892.000	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.500.000	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.500.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120.500.000		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120.500.000	-
						-
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.423.300.000	B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.496.552.400	2.073.252.400
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.423.300.000	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.496.552.400	2.073.252.400
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.037.436.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.081.936.000	2.044.500.000
	Pelayanan Informasi Publik	83.148.000		Pelayanan Informasi Publik	83.148.000	-
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	237.716.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	266.468.400	28.752.400
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	65.000.000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	65.000.000	-
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.778.578.624	C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.938.578.624	1.160.000.000
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.480.564.656	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.690.564.656	210.000.000

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	-
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.448.564.656		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.658.564.656	210.000.000
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.013.968	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.248.013.968	950.000.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	27.322.328		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	27.322.328	-
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.924.656		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	110.924.656	25.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	184.766.984		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	184.766.984	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	925.000.000	925.000.000
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	127.833.000	D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	302.833.000	175.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	127.833.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	302.833.000	175.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	275.000.000	175.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	27.833.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	27.833.000	-
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	97.760.500	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	97.752.500	8.000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.760.500	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.752.500	8.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.760.500		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.752.500	8.000

Dari Tabel 3.3. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 3.746.909.600,-. Kenaikan tersebut diperuntukkan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung
Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.464.160.238	3.845.252.017	3.677.887.131	3.505.467.205		4.515.951.238		
2	16	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.749.103.038	3.011.682.067	3.102.415.781	3.058.518.054		3.749.103.038		
2	16	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.749.103.038	3.011.682.067	3.102.415.781	3.058.518.054	98,59	3.749.103.038	DAU	
2	16	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					316.806.000	595.256.000	332.200.000	206.764.800		372.500.000		
2	16	01	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atribut	Kab. Temanggung	34	setel	11.050.000	-	-	-		12.500.000		
2	16	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	Kab. Temanggung			305.756.000	595.256.000	332.200.000	206.764.800	62,24	360.000.000	DBHCHT	
2	16	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.784.200	70.390.150	78.701.650	78.450.769		144.498.200		
2	16	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	4.999.050	9.391.350	9.256.550	98,56	11.000.000	DAU	
2	16	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	13.000.000	12.003.000	11.532.300	11.526.300	99,95	16.348.200	DAU	
2	16	1	2,0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	9.500.000	8.413.600	6.982.000	6.962.750	99,72	12.100.000	DAU	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	1	2,0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	30.284.200	14.988.500	16.023.000	15.996.050	99,83	39.050.000	DAU	
2	16	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	33.000.000	29.986.000	34.773.000	34.709.119	99,82	66.000.000	DAU	
2	16	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.967.000	107.927.200	100.574.000	97.923.303		113.850.000		
2	16	1	2,0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	3.075.000	3.075.000	1.485.000	1.381.500	93,03	5.500.000	DAU	
2	16	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.369.479	89,49	8.250.000	DAU	
2	16	1	2,0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	9.857.700	14.090.500	14.031.600	99,58	13.200.000	DAU	
2	16	1	2,0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	98.892.000	88.994.500	78.998.500	77.140.724	97,65	86.900.000	DAU	
2	16	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.500.000	59.996.600	63.995.700	63.810.279		136.000.000		
2	16	1	2,0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	68.000.000	59.996.600	63.995.700	63.810.279	99,71	76.000.000	DAU	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kab. Temanggung	2	paket	120.500.000		-	-	0,00	60.000.000	DAU	
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.496.552.400	2.774.182.800	3.000.420.650	2.872.477.430		3.981.000.000		
2	16	2	2,0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5.496.552.400	2.774.182.800	3.000.420.650	2.872.477.430		3.981.000.000		
2	16	2	2,0	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung, dan terealisasinya perbaikan tower RT FM	Kab. Temanggung	12	bulan	5.081.936.000		2.663.318.800	2.696.456.550	2.589.690.129	96,04	3.566.300.000	DAU
2	16	2	2,0	1	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	83.148.000		83.148.000	129.978.000	115.278.205	88,69	167.200.000	DAU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	2	2,0 1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu (M) Rp. 150.000.000,- Terlaksananya pelatihan komputer dan pengelolaan website di Kecamatan Bejen (M) Rp. 60.000.000,- Hasil Musrebang Rp. 27.716.000 honor SS	Kab. Temanggung	3	keg.	266.468.400		27.716.000	109.050.400	102.792.596	94,26	137.500.000	DAU
2	16	2	2,0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	65.000.000			64.935.700	64.716.500	99,66	110.000.000	DAU
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					2.938.578.624		1.914.038.825	2.329.791.500	2.286.694.168		5.570.000.000	
2	16	3	2,0 1		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.690.564.656		1.553.984.825	1.529.508.700	1.523.037.242		2.720.000.000	
2	16	3	2,0 1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.)	Kab. Temanggung	2	Blok IP	32.000.000		32.000.000	81.908.100	77.696.450	94,86	120.000.000	DAU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	3	2,0 1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	800	Mpbs	1.658.564.656	1.521.984.825	1.447.600.600	1.445.340.792	99,84	2.600.000.000	DAU	
2	16	3	2,0 2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.248.013.968	360.054.000	800.282.800	763.656.926		2.850.000.000		
2	16	3	2,0 2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	27.322.328	27.859.000	67.355.900	66.765.396	99,12	1.100.000.000	DAU	
2	16	3	2,0 2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	110.924.656	85.618.000	224.904.600	222.023.138	98,72	250.000.000	DAU	
2	16	3	2,0 2	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	12	bulan	184.766.984	246.577.000	508.022.300	474.868.392	93,47	600.000.000	DAU	
2	16	3	2,0 2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan multi media pada kelompok masyarakat	Kab. Temanggung	4	paket	925.000.000	-	-	-	0,00	900.000.000	DAU	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					302.833.000	127.833.000	179.395.700	172.156.065		352.000.000		
2	20	2	2,0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					302.833.000	127.833.000	179.395.700	172.156.065		352.000.000		
2	20	2	2,0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	4	dok.	275.000.000	100.000.000	133.054.700	128.726.751	96,75	280.500.000	DAU	
2	20	2	2,0 1	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bln	27.833.000	27.833.000	46.341.000	43.429.314	93,72	71.500.000	DAU	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					97.752.500	35.000.000	38.830.800	28.572.460		125.000.000		
2	21	2	2,0 1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					97.752.500	35.000.000	38.830.800	28.572.460		125.000.000		
2	21	2	2,0 1	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bln	97.752.500	35.000.000	38.830.800	28.572.460	73,58	125.000.000	DAU	
TOTAL										13.299.876.762		8.696.306.642	9.226.325.781	8.865.367.328	96,09	14.543.951.238	

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinkominfo Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinkominfo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinkominfo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinkominfo Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 86,16 %, dan realisasi Belanja Modal sebesar 10,10 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan caturwulan pertama terdiri dari Belanja Operasional sebesar 15,94 %, dan realisasi Belanja Modal sebesar 1,08%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 13.299.876.762,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program informasi dan komunikasi publik, program aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinkominfo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002